

DAFTAR PUSTAKA

I. Referensi Buku-Buku

- Adi Nugroho, Susanti, 2014, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Harahap, M. Yahya, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika Jakarta
- Harahap, M. Yahya, 2017, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika Jakarta
- Karjadi, M dan R.Soesilo, 2015, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor
- Lubis, Andi Fahmi, dkk, 2017, *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Otto, Jan Michiel, 2012, *Kepastian Hukum Yang Nyata di Negara Berkembang (Dalam Kajian Sosio-Legal)*, Pustaka Larasan, Bali
- Sirait, Ningrum Natasya, 2011, *Hukum Persaingan di Indonesia (UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)*, USU, Medan
- Sirait, Ningrum Natasya, 2011, *Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat*, USU, Medan
- Soemardjono, Maria SW., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum (Bahan Kuliah)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta
- Subekti, 2015, *Hukum Pembuktian*, Balai Pustaka, Jakarta
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung

II. Jurnal / Makalah

Berrisch, Georg, et al., 2004, *E. U. Competition and Private Actions for Damages, The Symposium on European Competition Law*, Northwestern Journal of International Law & Business, Volume 24, Issue 3 Spring

Guerrin, Maurice and Georgios Kyriazis, 1992, *Cartels : Proof and Procedural Issues*, Fordham International Law Journal, Volume 16, Issue 2

Junaidi, A., 2013, *Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) dan Penerapannya Dalam Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 32-No.5

Lianos, Ioannis & Christon Genakos, 2012, *Econometric Evidence in EU Competition Law : An Empirical and Theoretical Analysis*, Centre for Law, Economics and Society, CLES, Faculty of Law, UCL, CLES Working Paper Series

Lubis, Andi Fahmi, 2013, *Analisis Ekonomi Dalam Pembuktian Kartel*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 32-No.5

Mezak, M.H., 2016. *Jenis, Metode & Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, Law Riview, V(3)

Silalahi, Udin, 2013, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 32-Nomor 5, *Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) dan Penerapannya Dalam Hukum Persaingan Usaha*

Silalahi, Udin dan Isabella Cynthia Edgina, 2017, *Jurnal Yudisial*, Vol. 10, No. 3, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang

Spaak, Torben, 2008, *Meta-Ethics and Legal Theory : The Case of Gustav Radbruch*, Law and Philosophy, Vol.28 No.3 (May,2009), Springer

Sirait, Ningrum Natasya, 2017, *Quo Vadis Indirect Evidence Dalam Pemberantasan Kartel di Indonesia*, Materi Seminar MIH UGM-Jakarta

III. Internet

Alexy, Robert, "Gustav Radbruch's Concept of Law", <https://www.upjs.sk/public/media/16913/Gustav%20Radbruch%27s%20Concept%20of%20Law.pdf> diakses 15 Maret 2019.

Hukum Online, "Indirect Evidence sebagai Alat Bukti Kartel Dipersoalkan" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c56cf0541b26/alat-bukti-kartel-dipersoalkan> diakses 1 Maret 2019.

Wijayanti, Nur Ana dan Ditha Wiradiputra, “*Perbandingan Penanganan Perkara Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Antitrust Law di Amerika Serikat*”, <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-05/S57129-Nur%20Ana%20Wijayanti> akses tanggal 25 Februari 2019.

IV. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), diumumkan dengan maklumat, tanggal 30 April 1847, *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23.

Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB)/*Herzeine Inlands Reglement (HIR)*, *Staatsblad* Nomor 44 Tahun 1941.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam R. Soenarto Soerodibroto, KUHAP dan KUHAP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817)*.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang *Tatacara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2005.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang *Tata Cara Penanganan Perkara*, KPPU, Jakarta, 2010.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang *Kartel*, KPPU, Jakarta, 2011.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, KPPU, Jakarta, 2011.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang *Tatacara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, KPPU, Jakarta, 2019.

V. Putusan Pengadilan dan Lembaga Lain

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1495 K/PDT.SUS-KPPU/2017 perihal Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 02/PDT.SUS-KPPU/2015/PN.JKT.UTR. tanggal 12 November 2015 tentang *upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11, Pasal 19 huruf c, dan Pasal 24 UU No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Importasi Bawang Putih*, tanggal 25 April 2018.

Putusan MA Nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016 perihal Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 3/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst., tanggal 27 Mei 2015 tentang *upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU Nomor 26/KPPU-I/2007 tentang Dugaan Pelanggaran terhadap Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berkaitan dengan Layanan SMS*, tanggal 29 Februari 2016.

Putusan MA Nomor 582 K/Pdt.Sus-KPPU/2011 perihal Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/KPPU/2010/PN.JKT.PST tentang *upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 tentang Dugaan Pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berkaitan dengan Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia*, tanggal 25 November 2011.

Putusan MA Nomor 613 K/Pdt.Sus-KPPU/2011 perihal Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/KPPU/2010/PN.Jkt.Pst. tentang *upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU Nomor 25/KPPU-I/2009 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berkaitan dengan Penetapan Harga Fuel Surcharge dalam Industri Jasa Penerbangan Domestik*, tanggal 27 Februari 2012.

Putusan MA Nomor 294 K/Pdt.Sus-KPPU/2012 perihal Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 05/Pdt.KPPU/2010/PN.Jkt.Pst., tanggal 7 September 2011 tentang *upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2010 tentang Dugaan Pelanggaran terhadap Pasal 5, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 25 ayat*

(1) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri Farmasi Kelas Terapi Amlodipine, tanggal 28 Juni 2012.

Putusan MA Nomor 221 K/Pdt.Sus-KPPU/2016 perihal Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pdt.G/KPPU/2015/PN Jkt.Pst., tanggal 8 Juli 2015 tentang *upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Industri Otomotif terkait Kartel Ban Kendaraan Bermotor Roda Empat*, tanggal 14 Juni 2016.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 02/PDT.SUS-KPPU/2015/PN. JKT.UTR., perihal *Keberatan terhadap Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2013 tanggal 20 Maret 2014*, tanggal 12 November 2015.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/KPPU/2010/PN.JKT.PST tentang upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 tentang *Dugaan Pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berkaitan dengan Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia*, tanggal 23 Februari 2011.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 02/KPPU/2010/PN.Jkt.Pst tentang upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU Nomor 25/KPPU-I/2009 tentang *Dugaan Pelanggaran terhadap Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berkaitan dengan Penetapan Harga Fuel Surcharge dalam Industri Jasa Penerbangan Domestik*, tanggal 28 Februari 2011.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 3/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst., tentang upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU Nomor 26/KPPU-I/2007 tentang *Dugaan Pelanggaran terhadap Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berkaitan dengan Layanan SMS*, tanggal 27 Mei 2015.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 05/Pdt.KPPU/2010/PN.Jkt.Pst., tentang upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2010 tentang *Dugaan Pelanggaran terhadap Pasal 5, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri Farmasi Kelas Terapi Amlodipine*, tanggal 7 September 2011.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pdt.G/KPPU/2015/PN Jkt.Pst., tentang upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014 tentang *Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-*

Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Industri Otomotif terkait Kartel Ban Kendaraan Bermotor Roda Empat, tanggal 8 Juli 2015.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 163/KPPU/2017/PN.Jkt.Utr., tentang upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 tentang *Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Industri Sepeda Motor terkait penetapan harga sepeda motor jenis skuter matik 110-125 CC, tanggal 28 November 2017.*

Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2013 tentang *Dugaan Pelanggaran Pasal 11, Pasal 19 huruf c, dan Pasal 24 UU No. 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Importasi Bawang Putih, tanggal 20 Maret 2014.*

Putusan KPPU Nomor 26/KPPU-I/2007 tentang *Dugaan Pelanggaran terhadap Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berkaitan dengan Layanan SMS, tanggal 18 Juni 2008.*

Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 tentang *Dugaan Pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berkaitan dengan Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia, tanggal 4 Mei 2010*

Putusan KPPU Nomor 25/KPPU-I/2009 tentang *Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berkaitan dengan Penetapan Harga Fuel Surcharge dalam Industri Jasa Penerbangan Domestik, tanggal 4 Mei 2010*

Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2010 tentang *Dugaan Pelanggaran terhadap Pasal 5, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri Farmasi Kelas Terapi Amlodipine, tanggal 20 September 2010*

Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-I/2014 tentang *Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Industri Otomotif terkait Kartel Ban Kendaraan Bermotor Roda Empat, tanggal 7 Januari 2015.*

Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 tentang *Dugaan Pelanggaran Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Industri Sepeda Motor Jenis Skuter Matik 110-125 CC di Indonesia.*

VI. Lainnya

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Policy Roundtables Prosecuting Cartels without Direct Evidence, 2006.